

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan United Nations Development Program (UNDP) 2012 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2012 meningkat menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat 124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Sejak 1980 hingga 2012, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0,422 menjadi 0,629, atau meningkat 49 persen, dikarenakan kenaikan angka harapan hidup, pada periode yang sama, dari 57,6 tahun menjadi 69,8 tahun saat ini. Tingkat ekspektasi belajar di sekolah meningkat dari 8,3 tahun pada 1980 menjadi 12,9 tahun pada 2012. Artinya, anak usia sekolah di Indonesia memiliki harapan mengenyam bangku pendidikan selama 12,9 tahun atau mencapai tingkat pertama jenjang perguruan tinggi.

Meskipun indeks tersebut mengalami kenaikan tiga peringkat, IPM Indonesia masih di bawah rata-rata dunia 0,694 atau regional 0,683. Indonesia dikategorikan sebagai “Negara Pembangunan Menengah” bersama 45 negara lainnya. Peringkat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Singapura (18) memiliki IPM tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Brunei (30), Malaysia (64), dan Thailand serta Filipina masing-masing ada di peringkat 103 dan 114.

Sementara, bila kita simak lebih jauh indeks pendidikan Indonesia berada di urutan 6 dari 10 negara ASEAN. Sebagai tambahan, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) Indonesia berada di ranking 5 dari 10 negara ASEAN. Data-data ini melukiskan betapa pembangunan di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu berupaya keras demi menggapai kemajuan yang lebih baik.

Kemajuan suatu bangsa berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan suatu bangsa menjadi bangsa terpadang dan digdaya. Pendidikan melahirkan ilmu yang dapat membantu dalam mencipta dan menimbang suatu keputusan. Bangsa Indonesia sendiri dewasa ini giat mengejar ketertinggalannya melalui bidang pendidikan.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing bangsa, implementasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) akhirnya dipilih menjadi program unggulan dari Depdikbud (Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan). Ada kaitan yang begitu erat antara pendidikan dan TIK. Integrasi pendidikan dan TIK diyakini menjadi cara paling mutakhir yang dapat mengakselerasi tercapainya tanggung jawab besar pendidikan (mencerdaskan dan memajukan bangsa). TIK dinilai dapat berfungsi sebagai sumber, sarana belajar, serta cara berkomunikasi yang efisien. Lebih lanjut, jika dikelola secara bijaksana, TIK dapat bermanfaat untuk mengurangi disparitas pendidikan. Sehingga, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya secara global.

Namun, dalam upaya integrasi pendidikan dan TIK yang efektif, maka seharusnya faktor “*kesiapan*” menjadi modal utama. Faktor kesiapan, selanjutnya akan penulis sebut sebagai *e-Readiness* (*electronic readiness* – kesiapan elektronik), mesti menjadi faktor pertama dan utama yang harus dicapai. Sehingga, TIK sebagai pemutakhiran pembangunan pendidikan mampu terwujud secara paripurna.

Berbicara tentang *e-Readiness*, secara umum konsep ini dapat kita definisikan sebagai derajat kesiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) untuk membangun ekonomi yang efisien dan menggerakkan kesejahteraan dalam suatu masyarakat informasi (Nurhaida, 2011: 6). *e-Readiness* secara masif terus menjadi perhatian khusus bagi negara-negara berkembang yang sedang berusaha menjadi negara maju. Berbagai biaya dan upaya terus dikerahkan demi mampu mengukur tingkat *e-readiness* negara (Dada, 2006: 1). Mengapa demikian? Akses TIK, utamanya internet, dapat memfasilitasi keseimbangan distribusi sosial, ekonomi, kebijakan dan layanan politik (Jackson, 2004: 170). Karenanya, mengukur kesiapan teknologi atau TIK menjadi patut dilaksanakan.

Secara sederhana, mengukur *e-readiness* ialah menilik pada faktor konektivitas internet. Apakah suatu negara telah memiliki konektivitas internet yang baik, merupakan salah satu pertanyaan yang harus dijawab sebagai refleksi tingkat *e-readiness* yang baik. Walaupun demikian, sebuah laporan menyatakan bahwa *e-readiness* sebenarnya bukanlah sekedar berbicara tentang konektivitas internet.

Singapura dan Korea Selatan kini memimpin negara-negara dunia sebagai negara dengan koneksi internet terbaik. Namun demikian, dua negara tersebut tidak serta-merta menjadi *e-learner* terbaik. Faktor lain seperti sistem pendidikan yang mantap dan kekayaan konten *online* juga dibutuhkan sebagai negara yang siap secara elektronik (*e-ready*) (Economist Intelligence Unit, 2003: 3).

Berkaitan dengan koneksi dan pendidikan, data dilapangan menyatakan bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia justru belum terhubung Internet. Dalam Symposium On Open Distance and E-Learning (ISODEL 2007) baru 9% dari populasi sekolah yang berjumlah 220.000 yang terkoneksi ke internet. Bahkan koneksi ke internet yang diprakarsai oleh Kemendikbud dalam program Schoolnet pada tahun 2011 baru merancang 16.678 sekolah yang terlibat atau baru 7,2% dari total sekolah di Indonesia. Sebagai tambahan, dalam berita yang dilansir dari *Republika Online* (Zuhri, 2013) dan *Sindonews* (Yoenianto, 2013), pun bersama dengan bantuan dari pihak P.T. Telkom barulah membantu sedikitnya 18.000 sekolah untuk dapat terkoneksi ke internet. Artinya secara kuantitas koneksi internet ke sekolah-sekolah masih belum mencapai harapan. Sementara, sarana laboratorium komputer sebagai sarana membangun kompetensi TIK juga faktanya tidak jauh berbeda. Intinya, *e-readiness* Indonesia masih banyak memerlukan pembenahan dan peningkatan.

Selanjutnya, studi Nurhaida, dkk. (2011) menemukan bahwa 43% SLTA yang ada di Kota Bandarlampung yang nota bene adalah ibu kota propinsi tidak memiliki laboratorium yang memadai, baik dari segi kualitas maupun jumlah. Banyak

sekolah, utamanya SLTA swasta memiliki komputer kurang dari 10 unit, padahal siswa yang harus dilayani lebih dari 40 siswa. Padahal dalam program percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 (Inpres No.1 Tahun 2010) targetnya 40% SLTA dan 20% SLTP menerapkan sistem sekolah berbasis TIK. Fakta lain menunjukkan bahwa jaringan *broadband* yang tersedia di Lampung barulah sekitar sekitar 9,8% saja.

Beranjak dari sekolah menengah umum, penelitian ini menilik sekolah menengah agama atau di Indonesia populer disebut sebagai Madrasah. Madrasah di Indonesia merupakan satuan pendidikan yang berbasis agama. Menurut Tambak (2013: 70), kesadaran pentingnya moral dan etika hanya bisa tumbuh dari pendidikan agama. Manusia yang memiliki religiusitas kuat akan semakin termotivasi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat (Tambak, 2013: 41). Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendesak keterbutuhan akan satuan pendidikan yang berciri khas Islam, maka diciptakanlah madrasah.

Madrasah di Indonesia tersedia dengan macam-macam tingkatan. Sebagaimana sekolah umum, pemerintah menyediakan madrasah dari tingkat dasar hingga menengah bahkan perguruan tinggi. Namun demikian, berkaitan dengan penelitian ini periset berfokus pada madrasah tingkat menengah, yaitu Madrasah Aliyah (setingkat SMA/ SMK). Secara spesifik, penelitian ini jatuh pada pilihan Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kota Bandarlampung.

Pemerintah Kota Bandarlampung pada hal ini Departemen Agama Provinsi Lampung menyediakan dua Madrasah Aliyah Negeri, yaitu MAN 1 Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang. Pemerintah mendapuk MAN 1 Bandarlampung sebagai madrasah percontohan bagi seluruh madrasah yang ada di Povinsi Lampung. Sedangkan MAN 2 Tanjungkarang dicanangkan pemerintah sebagai madrasah yang meluluskan siswa-siswi siap bekerja. Sehingga, di MAN 2 Tanjungkarang terdapat jurusan-jurusan yang sifatnya teknis, yaitu elektro, otomotif, dan tata busana.

MAN 1 Bandarlampung sebagai madrasah percontohan mendapat suntikan dana dari pemerintah. Pemerintah banyak pula mengadakan kegiatan kependidikan di madrasah ini. Sementara, MAN 2 Tanjungkarang sekadar madrasah biasa yang menurut pada perkembangan yang ada.

Selain Madrasah Aliyah Negeri, pemerintah Kota Bandarlampung juga memberikan izin berdiri bagi Madrasah Aliyah Swasta. Madrasah Aliyah Swasta merupakan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya, Madrasah Aliyah Swasta tidaklah didanai dari anggaran pemerintah.

Secara nyata, perkembangan Madrasah Aliyah Negeri jauh pesat jika dibandingkan dengan Madrasah Aliyah Swasta. Hal ini tidak terlepas dari pendanaan yang di dapat madrasah aliyah negeri dari pemerintah, seperti dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Sedangkan Madrasah Aliyah Swasta benar-benar berdiri dengan dana yang keluar dari masyarakat. Dengan demikian,

bantuan yang diperoleh Madrasah Aliyah Negeri mewajibkan mereka untuk dapat bertanggungjawab pada pemerintah, beda halnya dengan Madrasah Aliyah Swasta yang memiliki manajemen di luar kewenangan pemerintah. Bertolak pada perkembangan, pendanaan, dan tugas madrasah negeri sebagai contoh bagi madrasah swasta. Maka, penelitian ini bekerja di ranah Madrasah Aliyah Negeri.

Madrasah Aliyah Negeri sebagai sekolah yang berbasiskan pengetahuan dan ketaqwaan idealnya butuh pada implementasi TIK. Madrasah seyogyanya mengimplementasikan TIK baik sebagai pelajaran sekolah maupun dalam sistem sekolah. Bagaimanapun madrasah harus terus mengembangkan diri sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu Menteri Agama Lukman Hakim Syafuddin dalam Nasrul (2014) berpendapat bahwa peran teknologi informasi dan media penting untuk menjadikan madrasah pada akhirnya sangat diperhitungkan dari sisi kualitas yang dimiliki.

Namun demikian, terdapat beberapa penolakan dari kalangan sekolah agama. Beberapa sekolah agama sering kali menilai buruk akan hadirnya inovasi teknologi. Bahkan penolakan ada kalanya menjadi sikap adopsi yang lumrah bagi sekolah agama. Salah satu sebabnya adalah keengganan membaaur pelajaran agama dengan pelajaran ilmu pengetahuan umum - dikotomis keilmuan (Daulay, 2012: 144; Putra, 2014). Membaur keduanya dianggap menjauhkan siswa dari nilai agama. Sementara, ketika teknologi telah ada “di depan wajah” sebagai intensi keberpihakan akan inovasi teknologi, sering kali sekolah-sekolah agama menjadi gagap akan teknologi. Hal ini tidak lain disebabkan minimnya

pengetahuan mereka terhadap teknologi tersebut. Tetapi, bukan berarti seluruh sekolah agama anti-teknologi sebagaimana dua madrasah aliyah negeri yang menjadi objek penelitian periset.

MAN 1 Bandarlampung dan MAN 2 Tanjungkarang sebagai dua Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandarlampung adalah sekolah-sekolah agama yang meleak teknologi. Dalam penelitian ini periset membedah lebih detil bagaimana dua madrasah ini berproses mencapai konsep *e-readiness* yang ideal. Periset menggunakan asesmen *e-readiness* yang diciptakan oleh CID (Center for International Development Harvard University, 2000), McConnell International (2001), dan Penelitian Nurhaida, dkk. (2011). Secara lebih detil, penelitian ini akan berfokus pada kategori “*Networked Learning*”, “*Human Capital*”, dan/atau “*Manajemen Sekolah*”. Poin-poin yang akan dielaborasi ialah akses TIK, penetrasi TIK, literasi TIK, *e-leadership*, kebijakan sekolah, struktur organisasi sekolah, SDM berbasis TIK, dan *best practice* dari masing-masing sekolah.

Sedangkan dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi, penelitian ini dapat kita golongan dalam kajian Komunikasi Pembangunan. Dalam kajian tersebut secara spesifik riset ini “menduduki” pembahasan Komunikasi Inovasi. Komunikasi Pembangunan secara substansial berbicara tentang bagaimana komunikasi menjadi alat yang manjur untuk membantu proyek pembangunan. Pembangunan pada kasus ini berupa berbagai perubahan-perubahan sosial menuju ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, demi mampu menuju dan menggapai perubahan sosial yang lebih baik tersebut, komunikasi pembangunan menjadi penting. Salah satu

bentuk dari komunikasi tersebut ialah sebagaimana riset yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu “*e-Readiness* Madrasah Aliyah Negeri di Kota Bandarlampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kesiapan MAN Kota Bandarlampung dalam mengimplementasikan TIK?
- b. Apakah ada perbedaan kesiapan implementasi TIK antar MAN?
- c. Hambatan-hambatan apakah yang dialami MAN dalam mengimplementasikan TIK dalam sistem sekolah?
- d. Apakah ada *best practice* yang dilakukan MAN dalam mengimplementasikan TIK?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan implementasi TIK di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di kota Bandarlampung berupa laboratorium komputer, manajemen dan koneksitasnya ke internet, kebijakan sekolah berkaitan dengan TIK, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber pendanaannya (*financial resources*).

- b. Mengungkapkan ada atau tidaknya perbedaan kesiapan implementasi TIK antar MAN.
- c. Mengungkapkan hambatan yang dialami MAN dalam mengimplementasikan TIK pada sistem sekolah.
- d. Mengungkapkan *best practice* yang dilakukan MAN dalam mengimplementasikan TIK.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini terdiri dari beberapa poin di bawah ini:

a. Secara Teoritis

Penemuan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Komunikasi di bidang komunikasi pembangunan, khususnya komunikasi inovasi di bidang TIK.

b. Secara Praktis

Penemuan kesiapan madrasah dalam mengimplementasikan TIK harapannya dapat menjadi masukan bagi pemegang kebijakan dalam merancang strategi dan mentransformasi pendidikan modern melalui *e-education*, yaitu bagi Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, serta Kementerian Agama, Departemen Agama Propinsi khususnya pula Departemen Agama Kota Bandarlampung.